

Judul : Banggar Akan 'Tancap Gas' Bahas RAPBN 2017
Tanggal : Jumat, 03 Juni 2016
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 3

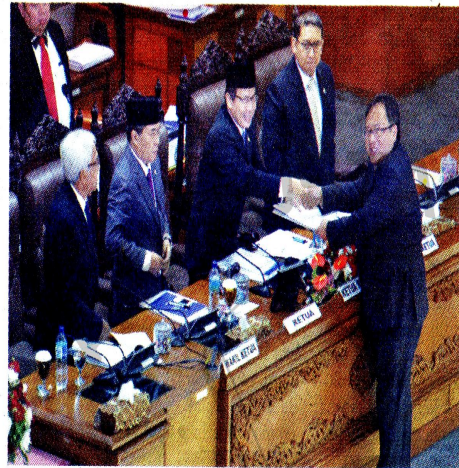
DPR RI

BANGGAR AKAN 'TANCAP GAS' BAHAS RAPBN 2017

DALAM rapat paripurna DPR, Menteri Keuangan memberikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2017.

Pemerintah memberikan respons, mengakomodasi, mengkodifikasi, dan mendalami masukan dari seluruh fraksi terkait dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2017. Sedangkan tindak lanjutnya, DPR akan menyerahkan proses pembahasan kerangka ekonomi makro 2017 kepada masing-masing fraksi di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, yang menjadi pemimpin rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kamis, 2 Juni 2016.

Setelah ini, Taufik menjelaskan,



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan didampingi Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto menerima Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi DPR tentang KEM-PPKF 2017.

Banggar DPR akan langsung 'tancap gas' membahas RAPBN 2017. Secara bersamaan, Banggar juga akan membahas revisi UU APBN 2016 dalam bentuk APBN-Perubahan 2016, setelah menunggu tindak lanjut dari RUU *Tax Amnesty*.

"Setelah (jawaban) diberikan Banggar, presiden akan menyampaikan RAPBN 2017 dalam Nota Keuangan pada pertengahan Agustus mendatang," tutur politisi Partai Amanat Nasional itu.

Dalam jawaban pemerintah tersebut masih memuat perbedaan asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 antara DPR dan pemerintah. DPR optimis asumsi pertumbuhan ekonomi di angka 5,1 persen, sedangkan pemerintah di kisaran 5,3-5,9 persen.

Menanggapi perbedaan tersebut, Taufik mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,0-5,5 persen merupakan asumsi terakhir yang disampaikan Bank Indonesia (BI). Sedangkan asumsi DPR, pertumbuhan

ekonomi minimal 5,1 persen. Dengan kondisi *tax amnesty* yang segera dapat diputuskan, Taufik memprediksi angka pertumbuhan 5,1 persen sudah berada di tangan. Tinggal pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi dari 5,1 menjadi 5,3 persen guna mendukung pengembangan ekonomi 2017. DPR juga berharap, kebijakan *tax amnesty* berdampak positif mendukung APBN 2016 yang sedang berjalan.

Dalam pandangan pemerintah terkait dengan perkiraan asumsi makro 2017, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan berbagai pihak perlu waspada terhadap dinamika ekonomi di tengah ketidakpastian perekonomian global. Tantangan yang masih membayangi, antara lain lemahnya kinerja mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok, Jepang, dan Eropa.

"Meski demikian, perekonomian dunia diprediksi lebih baik daripada 2016 sehingga berdampak positif terhadap peningkatan volume perdagangan dunia yang akan mendorong kinerja neraca perdagangan nasional, khususnya di sisi ekspor," ucap Menkeu.

Menkeu juga menegaskan, pemerintah menyadari isu kesenjangan di Indonesia

perlu mendapatkan perhatian khusus. Penurunan kesenjangan menjadi prioritas dan sasaran pembangunan nasional 2017.

Terkait kebijakan *tax amnesty* yang masih dalam proses pembahasan DPR, Menkeu menyampaikan, kebijakan tersebut untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus menarik dana yang selama ini masih berada di luar negeri sehingga dana tersebut dapat menggerakkan ekonomi nasional. Pemerintah berkeyakinan, *tax amnesty* merupakan sebuah kebijakan terobosan yang dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan dan perbaikan sistem pajak pada masa mendatang.

"Adanya *tax amnesty* maka basis pajak diharapkan dapat diperluas sehingga menjamin sustainabilitas dan penerimaan negara. Pemerintah berkomitmen terus memperbaiki basis data perpajakan, diikuti dengan kebijakan penegakan hukum dan penindakan secara konsisten dan tegas," papar Menkeu.

Untuk itu, program *tax amnesty* perlu dikawal secara optimal dan ditindaklanjuti dengan program-program lain sehingga berdampak positif bagi pendapatan negara dan perekonomian. ●